

PENULISAN SKRIPSI
ANEKSASI WILAYAH TEPI BARAT SUNGAI JORDAN (*WEST BANK*)
OLEH ISRAEL DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL



Diajukan Oleh:

Nama : Chaterine Maudy Amelia Widi
NPM : 170512882
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan
Internasional

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
ANEKSASI WILAYAH TEPI BARAT SUNGAI JORDAN (*WEST BANK*)
OLEH ISRAEL DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL



Diajukan oleh:
Chaterine Maudy Amelia Widi
NPM : 170512882
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 4 Maret 2021
Dosen Pembimbing

Dr.G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**ANEKSASI WILAYAH TEPI BARAT SUNGAI JORDAN (*WEST BANK*) OLEH
ISRAEL DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 19 April 2021

Susunan Tim Penguji	
Ketua	: Dr.G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.
Sekretaris	: Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum
Anggota	: Dr. Triyana Yohanes., S.H., M.Hum

Tanda Tangan

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “ANEKSASI WILAYAH TEPI BARAT SUNGAI JORDAN (*WEST BANK*) OLEH ISRAEL DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL.”

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberi kritik dan saran serta semangat dengan caranya masing-masing. Penulis secara khusus ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiandi, M.Eng., Ph.D selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan senang hati bersedia membimbing dan mendampingi penulis serta memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Keluarga penulis tercinta yang telah senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Teman-teman terdekat penulis atas dukungan yang telah diberikan.

7. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan semuanya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan dan kritik guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 1 Maret 2021

Penulis,



Chaterine Maudy Amelia Widi

ABSTRACT

The Palestinian-Israeli conflict is the longest-running conflict in the Middle East (apart from the crusade). For decades, this conflict has not met the best solution for both parties. Even there is still a military confrontation between Israel and Palestine until finally in 2020, Prime Minister Netanyahu plans to annex the West Bank. The purpose of this research is to determine whether Israel's act of annexing the West Bank (West Bank) Jordan River is an act that violates international law or not. The analytical method used in this research is juridical normative, where data is obtained from statutory regulations, books, journals, and the internet. The conclusion of this research is that Israel's plan to annex the West Bank of the Jordan River is against international law because annexation is the incorporation of a territory of another country by force or coercion into the territory of the annexing country.

Keywords: Annexation, West Bank of the Jordan River, International Law



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
A. Rumusan Masalah	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Manfaat Penelitian	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Batasan Konsep.....	9
F. Metode Penelitian	10
BAB II	14
PEMBAHASAN.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Negara.....	14
B. Prinsip dan Cara Memperoleh Wilayah Negara.....	20
C. Pengertian Aneksasi dan Larangan Aneksasi.....	25
D. Tindakan Israel Menganeksasi Wilayah Tepi Barat (<i>West Bank</i>) Sungai Jordan	
29	
1. Geografi Tepi Barat Sungai Jordan.....	29
2. Sejarah Konflik Tepi Barat.....	31
3. Upaya PBB dalam Menangani Konflik Israel dan Palestina.....	34
4. Kasus Aneksasi Krimea Oleh Rusia Sebagai Pembanding	37
BAB III.....	39
PENUTUP.....	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	41

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Maret 2021

Yang menyatakan



Chaterine Maudy Amelia Widi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik Palestina-Israel adalah konflik yang paling lama berlangsung di wilayah Timur Tengah (selain perang salib). Selama puluhan tahun lamanya konflik ini masih belum menemui solusi terbaik bagi kedua belah pihak bahkan masih terjadi konfrontasi militer antara Israel dan Palestina untuk memperebutkan wilayah geografis yang terletak di antara Laut Mediterania dan Sungai Jordan.

Konflik Palestina dan Israel telah berlangsung sejak awal 1900-an ketika wilayah yang sebagian besar Arab dan Muslim masih menjadi bagian Kekaisaran Ottoman. Setelah Perang Dunia I, Inggris mendapatkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa untuk membantu mendirikan negara bagi orang-orang Yahudi di wilayah tersebut. Ratusan ribu orang Yahudi pindah ke daerah itu sebagai gerakan Zionisme. Mulai dari sini muncul kesadaran orang-orang yahudi yang hidup di berbagai negara untuk mengakhiri penderitaan yang mereka alami dengan kembali ke Palestina.¹ Tentu saja hal ini menimbulkan konflik seperti kekerasan komunal antara orang Yahudi dan Arab di Palestina mulai diluar kendali.

Pada tahun 1947, PBB menyetujui rencana membagi Palestina menjadi wilayah, yaitu untuk orang Yahudi yang disebut Israel dan untuk orang Arab yang disebut Palestina. Sedangkan Yerusalem, kota suci bagi orang Yahudi dan

¹Hermawati, 2005, *Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, edisi I, hlm. 87.

Muslim, menjadi zona internasional khusus. Tetapi rencana itu tidak pernah terlaksana. Para pemimpin Arab di wilayah itu menganggap rencana itu sebagai pencurian kolonial Eropa dan menginvasi Palestina untuk menjaga Palestina tetap bersatu. Pada 14 Mei 1948 negara Israel pun berdiri. Pasukan Israel memenangkan perang 1948, tetapi Israel mengklaim tanah melampaui batas yang ditentukan PBB. Israel menduduki tanah yang telah menjadi bagian Palestina, termasuk bagian barat Yerusalem. Perang 1948 berakhir dengan Israel mengendalikan semua wilayah yang saat ini ditandai di peta sebagai Israel. Hubungan antara Israel dan negara-negara Arab tidak kunjung membaik selepas Perang Arab Israel 1948.

Pada tahun 1967, terjadi perang Enam Hari pada tanggal 5 Juni hingga 10 Juni dimana Israel memenangkan perang tersebut dan mengakibatkan Israel merebut Tepi Barat dan Yerusalem Timur dari Yordania. Palestina menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 15 November 1988, yang pertama mendeklarasikan kemerdekaannya adalah Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Kemudian antara tahun 1993 dan 2001 PLO dan Otoritas Palestina menandatangani perjanjian dengan Israel dan melakukan beberapa pertemuan untuk membawa perdamaian diantara Israel dan Palestina. Namun di awal tahun 2014, proses perdamaian terhambat karena Israel membangun pemukiman baru Yahudi di wilayah Palestina. Situasi kian memanas hingga akhirnya pada tahun 2020, Perdana Menteri Netanyahu berencana untuk menganeksasi wilayah Tepi Barat pada 1 Juli mendatang memicu konflik Palestina-Israel kembali memanas.

Tepi Barat atau West Bank sendiri adalah bekas wilayah mandat Britania di Palestina yang diduduki oleh Israel usai Perang Enam Hari 1967. Tepi Barat

dihuni oleh sekitar 2,1 juta sampai 3 juta warga Palestina. Wilayah tersebut (selain Yerusalem Timur) juga menjadi rumah bagi sekitar 430.000 warga Yahudi Israel yang tinggal di 132 permukiman dan dibangun di bawah pendudukan Israel. Salah satu faktor yang mendorong Israel dalam melakukan aneksasi adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini ditunjukkan dengan suburannya lahan di Tepi Barat yang memiliki potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi Palestina.² Sekitar 60-80 persen wilayah Tepi Barat merupakan lahan pertanian dengan hasil perkebunan buah-buahan dan sayuran. Kesuburan itu tak lepas dari keberadaan Sungai Jordan yang mencakup 25 persen dari wilayah Tepi Barat. Seperti diketahui, sumber daya air menjadi salah satu masalah politik besar di Timur Tengah, selain minyak. Saat ini, ada sekitar 12.000 penduduk Palestina yang hidup di sekitar Sungai Jordan dan sebagian besar bergantung pada pertanian.

Selain memiliki wilayah yang subur, Tepi Barat juga memiliki potensi industri wisata yang sangat besar, khususnya wisata sejarah di sejumlah kota, seperti Betlehem, Ramallah, dan Neblus. Tepi Barat juga memiliki wisata air yang menjadi magnet besar para wisatawan dunia, yaitu Laut Mati, titik terendah bumi dan dikelilingi pemandangan dari Gurun Negev. Hal-hal tersebut yang mendorong Israel ingin menganeksasi Tepi Barat.

Tindakan Israel yang berencana menganeksasi Tepi Barat telah ditentang oleh Menteri Luar Negeri Mesir, Perancis, Jerman, dan Yordania, demikian

²Document of the World Bank, 2013, "Westbank and Gaza Area C and the Future of the Palestinian Economy", Report No. AUS2922, Poverty Reduction and Economic Management Department Middle East and North Africa Region hlm.7

dikutip dari Al-Jazeera.³ Beberapa Menteri Luar Negeri tersebut mendesak Israel untuk menghentikan rencana tersebut sekaligus memperingatkan bahwa tindakannya akan berdampak serius bagi stabilitas dan keamanan di kawasan, serta akan menjadi hambatan besar bagi upaya perdamaian yang menyeluruh dan adil bagi Palestina. Selain Amerika Serikat, justru tidak ada negara lain yang mendukung tindakan aneksasi Israel atas sekitar 30 persen kawasan West Bank.⁴

Perkembangan terkini mengenai rencana israel dalam melakukan aneksasi tepi barat mengalami penundaan untuk dilaksanakannya aneksasi tersebut, terlihat dari beberapa pertemuan yang dilakukan secara daring oleh Antonio Guterres dengan Dewan Keamanan PBB “Jika diterapkan, aneksasi akan menjadi pelanggaran hukum Internasional yang paling serius, sangat merugikan prospek solusi dua negara dan melemahkan kemungkinan pembaruan negosiasi. Saya meminta Pemerintah Israel membatalkan rencana aneksasinya”.⁵ Penundaan aneksasi ini tidak hanya dikarenakan himbauan dari sekretaris jenderal PBB, namun dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menunda rencana penganeksasian wilayah Tepi barat dan Lembah Sungai Yordan yang akan dianeksasi oleh bangsa Israel ini telah jelas melanggar Hukum Internasional dan beberapa prinsip lainnya.

Pada dasarnya, aneksasi dilarang oleh Hukum Internasional karena aneksasi adalah akuisisi paksa atas wilayah dengan mengorbankan negara

³Aljazeera, “Egypt, France, Germany and Jordan warn Israel over annexation” <https://www.aljazeera.com/news/2020/07/07/egypt-france-germany-and-jordan-warn-israel-over-annexation/> diakses 27 September 2020 pukul 4.34 WIB

⁴Mustafa Devici, “Israel’s 'annexation' plan only supported by US” <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israel-s-annexation-plan-only-supported-by-us/1898880> diakses 1 Oktober 2020 pukul 18.44

⁵UN News, “UN Chief Urges Israel to Abandon Annexation Plans” <https://news.un.org/en/story/2020/06/1066972> diakses 27 September 2020 pukul 21.29 WIB

bagian lain.⁶ Aneksasi telah dilarang dalam praktek negara oleh banyak sumber hukum internasional sehingga menjadi hukum kebiasaan internasional. Dalam pasal 47 Konvensi Jenewa IV, aneksasi wilayah yang diduduki selama periode permusuhan dianggap sebagai tindakan pelanggaran karena aneksasi seharusnya dilakukan setelah kesepakatan damai terjadi. Hal ini menandai perbedaan antara aneksasi dan okupasi, dimana okupasi adalah situasi sementara dimana kekuasaan pendudukan membatasi pelaksanaan hak oleh penguasa di wilayah yang diduduki tanpa menghilangkan status negara atau kedaulatan mereka. Okupasi sebagian besar merupakan tindakan militer sedangkan aneksasi adalah tindakan akuisisi penuh wilayah ke dalam wilayah kekuasaan pendudukan.⁷ Ketika aneksasi terjadi, terjadi transfer kedaulatan dari kekuasaan yang sebelumnya berkuasa ke yang baru. Apa yang dilakukan Israel di Tepi Barat adalah okupasi yang bertujuan untuk aneksasi dan hal ini dilarang dalam Hukum Internasional.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka diangkat rumusan permasalahannya: **Apakah tindakan Israel menganeksasi Wilayah Tepi Barat merupakan tindakan yang melanggar Hukum Internasional?**

⁶ Rainer Hofmann, 2013, “Annexation”, *Max Planck Encyclopedia of Public International Law I*, Ridiger Wolfrum”

⁷ ICRC, “Treaties, States Parties and Commentaries”, <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=C4> diakses tanggal 20 Oktober 2020 pukul 22.11 WIB

B. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari rencana penelitian ini adalah untuk mengetahui Tindakan Israel menganeksasi West Bank Sungai Jordan merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional atau tidak.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian memiliki dua manfaat, baik dalam teoritis maupun praktis:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan untuk berbagai perkembangan ilmu hukum secara luas, dan terlebih khusus untuk bidang hukum tentang hubungan internasional, yaitu tindakan Israel menganeksasi West Bank Sungai Jordan ditinjau dari hukum internasional.

2. Praktis

Secara Praktis dimaksudkan dapat bermanfaat sebagai data informasi yang lebih mendalam didalam bidang hukum tentang hubungan Internasional untuk:

- a. Untuk para Akademisi, sebagai data rujukan dalam proses pengajaran dan penelitian selanjutnya mengenai aneksasi serta mengkaji lebih lanjut mengenai apakah tindakan Israel yang menganeksasi West Bank Sungai Jordan melanggar Hukum Internasional.
- b. Sebagai referensi bagi semua pihak, terutama bagi masyarakat internasional dan yang bernaung di bawah dunia hukum khususnya hukum internasional.

- c. Sebagai prasyarat untuk menyelesaikan program S-1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Aneksasi Wilayah Tepi Barat Sungai Jordan (*West Bank*) Oleh Israel Ditinjau Dari Hukum Internasional merupakan karya asli, dan bukan merupakan plagiasi. Ada beberapa skripsi yang senada dengan penelitian ini, yaitu:

- i. Identitas penulis: Mursayinah (Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, 2015)

Judul: Perluasan Wilayah Israel di Palestina Ditinjau Dari Hukum Internasional

Hasil penelitian: penelitian ini menekankan pada perluasan wilayah yang telah dilakukan oleh Israel terhadap wilayah Palestina dan status hukum dari perluasan wilayah tersebut sebelum rencana aneksasi Tepi Barat Sungai Jordan.

Perbedaan antara penulisan hukum pembeding dengan penulisan hukum yang akan disusun adalah penulisan hukum yang akan disusun menekankan pada tindakan Israel menganeksasi Wilayah Tepi Barat merupakan tindakan yang melanggar Hukum Internasional atau tidak.

- ii. Identitas Penulis: Fransisca Devega Matulesy (Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015)

Judul: Penggabungan Wilayah Crimea Menjadi Bagian Negara Rusia Ditinjau Dari Tata Cara Perolehan Wilayah Negara Berdasarkan Hukum Internasional

Hasil Penelitian: penelitian ini menekankan pada aneksasi wilayah Crimea oleh Rusia sah atau tidak berdasarkan Hukum Internasional

Perbedaan antara penulisan hukum pembeding dengan penulisan hukum yang akan disusun yaitu penulisan hukum yang akan disusun mengenai aneksasi menurut Hukum Internasional namun dengan studi kasus yang berbeda yakni kasus aneksasi Tepi Barat Sungai Jordan oleh Israel

iii. Identitas Penulis: Komala Sari Suci (Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017)

Judul: Analisis Kebijakan Luar Negeri Rusia Terhadap Aneksasi Krimea Pada Tahun 2014

Hasil Penelitian: Penelitian ini menekankan bahwa kebijakan Aneksasi yang dilakukan oleh Rusia terlihat dari perubahan sikap Rusia yang drastis terhadap Ukraina ketika Ukraina semakin condong kepada Uni Eropa dan seketunya Barat. Tanpa ragu Rusia secara sengaja bisa dianggap telah melanggar hukum internasional. Sebagai sebuah kebijakan, aneksasi yang dilakukan oleh Rusia memiliki sebab-sebab tertentu, tujuan-tujuan tertentu serta dilakukan dengan cara-cara tertentu yang juga digambarkan sebagai sebuah strategi luar negeri untuk mencapai atau mempertahankan kepentingan nasionalnya.

Perbedaan antara penulisan hukum pembeding dengan penulisan hukum yang akan disusun adalah penulisan hukum yang akan disusun

menekankan pada tindakan Israel menganeksasi Wilayah Tepi Barat merupakan tindakan yang melanggar Hukum Internasional atau tidak.

E. Batasan Konsep

Didalam penelitian ini perlu adanya beberapa batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dapat dijadikan pedoman dalam penelitian, sehingga tujuan tidak keluar dan menyimpang. Dalam penulisan hukum dengan judul Aneksasi Tepi Barat Sungai Jordan (West Bank) Oleh Israel Ditinjau dari Hukum Internasional ini penulis memilih konsep-konsep sebagai berikut :

1. Aneksasi telah dilarang sebagai praktek negara oleh begitu banyak sumber hukum internasional sehingga menjadi hukum kebiasaan internasional. Banyak praktisi hukum dan penerbit telah menjelaskan bagaimana aneksasi terkait erat dengan larangan penggunaan kekuatan dalam Piagam PBB dan telah dianggap tidak sah dalam hukum internasional sejak Pengadilan Kejahatan Perang Nuremberg.⁸
2. West Bank Tepi Sungai Jordan adalah sebuah *landlocked area* yang menguntungkan berisi situs-situs suci tiga agama abrahamik yang mencakup sebagian kecil Laut Mati, Tepi Barat telah menjadi objek kontroversi dan perselisihan yang datang dari pendudukan Israel di daerah tersebut.⁹¹⁰

⁸ Christian Marxsen, "Territorial Integrity in International Law", 75 HEIDELBERG J. INT'L L. (2015), hlm 7-8

⁹ CIA, "The World Factbook – Middle East: West Bank", <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/we.html> , diakses pada 20 November 2020 pukul 14.20 WIB

¹⁰ World Bank, "Area C and the Future of the Palestinian Economy", <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16686/AUS29220REPLAC0EVISION0January02014.pdf?sequence=1>, diakses pada 21 November 2020

3. Hukum Internasional adalah keseluruhan dari hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip dan kaidah perilaku yang oleh karena itu negara-negara di dunia merasa terikat untuk menaati sehingga dalam hubungan satu sama lain benar-benar ditaati secara umum.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.¹²

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normative (normative legal research) dengan mengkaji permasalahan Aneksasi Westbank Oleh Israel berdasarkan hukum internasional.

2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari

- a) Bahan hukum primer yang terdiri dari aturan hukum internasional. Bahan hukum primer berupa instrument-instrumen hukum internasional yang ditaati dan diakui oleh masyarakat internasional. Bahan hukum primer terdiri dari data yang diambil dari instrument hukum internasional yang berhubungan dengan

¹¹ J. G. Starke, 2010, Pengantar Hukum Internasional, Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, cetakan kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

¹² Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, edisi ke-1 cetakan ke-6, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 41-42.

aneksasi, Tepi Barat Sungai Jordan dan tata cara perolehan wilayah negara berdasarkan hukum internasional. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

- i. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
 - ii. Konvensi Montevideo 1933
 - iii. *United Nations Security Council Resolution 242* (22 November 1967) adalah resolusi yang menuntut Israel untuk segera menarik pasukannya dari seluruh wilayah yang didudukinya dalam Perang Enam Hari.
 - iv. International Court of Justice, *Palestinian Wall Advisory Opinion* (2004)
- b) Bahan hukum sekunder terdiri dari fakta hukum internasional, doktrin, asas-asas hukum internasional, prinsip-prinsip hukum internasional dan pendapat hukum para ahli Hukum Internasional dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur tentang Hukum Internasional, pendapat hukum para ahli hukum internasional, prinsip-prinsip hukum internasional, doktrin yang diakui oleh masyarakat internasional, jurnal, artikel, internet (website) terkait aneksasi, tata cara perolehan wilayah negara serta yang berkaitan dengan aneksasi Tepi Barat Sungai Jordan oleh Israel ditinjau dari hukum internasional.

3. Metode Pengumpulan Data

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari buku-buku atau literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, berita, dan informasi di internet (*website*) yang berkaitan dengan aneksasi Tepi Barat Sungai Jordan oleh Israel ditinjau dari hukum internasional. Literatur dan artikel yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- b. Jus Mundi adalah situs yang menyediakan alat penelitian cerdas untuk mencari putusan internasional

4. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maupun penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami data atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

5. Proses Berpikir

Proses berfikir atau alur bernalar yang digunakan yaitu deduktif. Alur bernalar deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum yang telah diketahui dan diyakini kebenarannya yaitu yang berkaitan dengan aneksasi, larangan aneksasi menurut hukum internasional dan wilayah Tepi Barat Sungai Jordan.

Proses berpikir deduktif ini berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus mengenai aneksasi Tepi Barat Sungai Jordan oleh Israel ditinjau dari hukum internasional.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Tepi Barat atau *West Bank* adalah bekas wilayah mandat Britania di Palestina yang diduduki oleh Israel usai Perang Enam Hari 1967. Salah satu faktor yang mendorong Israel dalam melakukan aneksasi adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini ditunjukkan dengan suburinya lahan di Tepi Barat yang memiliki potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi Palestina. Sekitar 60-80 persen wilayah Tepi Barat merupakan lahan pertanian dengan hasil perkebunan buah-buahan dan sayuran. Kesuburan itu tak lepas dari keberadaan Sungai Jordan yang mencakup 25 persen dari wilayah Tepi Barat. Aneksasi resmi dari sebagian besar Tepi Barat akan mengirimkan pesan yang kuat tentang kedaulatan Israel atas tanah Palestina. Ini juga akan menjadi keuntungan bagi pemukim Israel, karena aneksasi dapat lebih melegitimasi pembangunan di daerah tersebut dan berpotensi membuat permukiman tumbuh. Keadaan warga Palestina yang tinggal di Lembah Yordania juga tidak pasti, karena tidak jelas dalam rencana Netanyahu apakah mereka akan dianggap sebagai warga negara Israel atau penduduk dengan hak yang lebih rendah. Rencana Israel ingin menganeksasi Tepi Barat Sungai Jordan bertentangan dengan Hukum Internasional karena aneksasi merupakan penggabungan suatu wilayah negara lain dengan kekerasan atau paksaan ke dalam wilayah negara yang

menganeksasi. Selain itu, aneksasi juga melanggar prinsip-prinsip dalam Hukum Internasional yaitu prinsip integritas teritorial prinsip *non-intervention*, prinsip *non use of force*, dan prinsip *sovereign equality*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, Israel tidak dapat dipungkiri memiliki keistimewaan karena berbagai resolusi yang dikeluarkan oleh PBB tidak ditaati dan biasanya Israel selalu mendapat dukungan Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB. Maka penulis mengajukan saran yakni cara yang dapat dilakukan komunitas internasional untuk menghentikan keistimewaan yang masih dinikmati Israel hingga saat ini adalah melakukan hal yang sama seperti dalam kasus Krimea. Kasus aneksasi Tepi Barat Sungai Jordan bisa dihentikan jika seluruh negara ataupun organisasi internasional bekerjasama untuk menghentikan, tidak mendukung dan tidak mengakui tindakan Israel yang akan menganeksasi Tepi Barat Sungai Jordan. Kasus Crimea bisa menjadi sebuah bukti konkrit sekalipun pelanggaran dilakukan oleh negara adidaya pemegang veto seperti Rusia. Diharapkan dengan cara yang sama yakni seluruh masyarakat internasional bekerjasama untuk tidak mengakui aneksasi tersebut dapat menghentikan Israel untuk melakukan aneksasi Tepi Barat Sungai Jordan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Adolf, Huala, 2002, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dedi Supriyadi, 2013, *Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi)*, CV Pustaka Setia, Bandung
- Hermawati, 2005, *Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi*, edisi I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- J. G. Starke, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, cetakan kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta
- John P. Grant, J. Craig Barker (eds.), 2009, *Encyclopaedic Dictionary of International Law (3 ed.)*, Oxford University Press, Oxford
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1986. *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Jakarta.
- Leland M Goodrich, Edward Hambro and Anne Patricia Simmons, 1969, *Charter of the United Nations, Commentary and Documents*, Third and Revised Edition, Columbia University Press, New York
- L. Oppenheim, 1955, *International Law: A Treatise, Vol. I – Peace*, Longmans, Edinburgh
- Malcolm Shaw, 2008, *International Law (6th Ed.)*, Cambridge University Press, Cambridge
- Rainer Hofmann, 2013, *Annexation in Max Planck Encyclopedia of Public International Law I 1* (Ridiger Wolfrum)
- Sefriani, 2011, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wallace, Rebecca M., 1993, *Hukum Internasional*, IKIP Semarang Press, Semarang

Skripsi

Mursayinah, 2015, “Perluasan Wilayah Israel di Palestina Ditinjau Dari Hukum Internasional” , Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura.

Fransisca Devega Matulesy, 2015, “Penggabungan Wilayah Crimea Menjadi Bagian Negara Rusia Ditinjau Dari Tata Cara Perolehan Wilayah Negara Berdasarkan Hukum Internasional” , Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Komala Sari Suci, 2017, “Analisis Kebijakan Luar Negeri Rusia Terhadap Aneksasi Krimea Pada Tahun 2014” , Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Peraturan Perundang-Undangan

ICRC Treaties

International Court of Justice, Palestinian Wall Advisory Opinion (2004)

Konvensi Montevideo Tahun 1933

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

United Nations Security Council Resolution 242 (22 November 1967) tentang resolusi yang menuntut Israel untuk segera menarik pasukannya dari seluruh wilayah yang didudukinya dalam Perang Enam Hari.

Jurnal

Christian Marxsen, 2015, “Territorial Integrity in International Law”, 75 HEIDELBERG J. INTL L.

Document of The World Bank, 2013, “Westbank and Gaza Area C and the Future of the Palestinian Economy”, Report No. AUS2922, Poverty Reduction and Economic Management Department Middle East and North Africa Region.

Leland M Goodrich, Edward Hambro and Anne Patricia Simmons, 1969, “Charter of the United Nations, Commentary and Documents, Third and Revised Edition”, Columbia University Press, New York.

Internet

Aljazeera, “Egypt, France, Germany and Jordan warn Israel over annexation”
<https://www.aljazeera.com/news/2020/07/07/egypt-france-germany-and-jordan-warn-israel-over-annexation/> diakses 27 September 2020
 pukul 4.34 WIB

Britannica, “West Bank” <https://www.britannica.com/place/West-Bank> diakses
 pada tanggal 1 Januari 2021

CIA, “The World Factbook – Middle East: West Bank”,
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/we.html> , diakses pada 20 November 2020 pukul 14.18
 WIB

CIA, “The World Factbook – Middle East: West Bank”,
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/we.html> , diakses pada 20 November 2020 pukul 14.20
 WIB

CIA, “The World Factbook – Middle East: West Bank”,
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/we.html> , diakses pada 20 November 2020

Deutsche Welle, “The West Bank and the Jordan Valley explained”
<https://www.dw.com/en/the-west-bank-and-the-jordan-valley-explained/a-50385231> diakses pada tanggal 28 Januari 2021

ICRC, “Treaties, States Parties and Commentaries”, <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=C4> diakses tanggal 20 Oktober 2020 pukul 22.11
 WIB

ICRC, “Treaties, States Parties and Commentaries”, <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=C4712FE71392AFE1C12563CD0042C34A> ,
 diakses 1 Oktober 2020 pukul 19.13 WIB

Mustafa Devici, “Israel’s 'annexation' plan only supported by US”
<https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israel-s-annexation-plan-only-supported-by-us/1898880> diakses 1 Oktober 2020 pukul 18.44

Metha Dewi Subakti, Metode Penelitian Hukum Normatif,
<http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/> diakses pada tanggal 3 Desember 2020, pkl. 7:50
 WIB.

UN News, “UN Chief Urges Israel to Abandon Annexation Plans”
<https://news.un.org/en/story/2020/06/1066972> diakses 27 September 2020 pukul 21.29 WIB

World Bank, “Area C and the Future of the Palestinian Economy”,
<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16686/AUS29220REPLAC0EVISION0January02014.pdf?sequence=1>,
diakses pada 21 November 2020

